

Dinamika Perundingan Damai: Efektivitas Mediasi Internasional Dalam Konflik Sudan Selatan

Hesti Rosdiana¹, Vania Zahra Nathania², Irwansyah³

Department of Social Sains, Universitas YMMA Sumut Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 Maret 2025

Revised: 11 April 2025

Accepted: 12 Juni 2025

Keywords:

South Sudan conflict,
peace building,
mediator role

Correspondence:

Hesti Rosdiana

hesti.rosdiana@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Pasca referendum kemerdekaan, Sudan Selatan berada dalam kondisi destabilisasi politik yang membawanya kembali ke dalam suatu konflik. Konflik ini diawali dengan adanya rasa ketidakpuasan terhadap elit politik pemerintahan oleh suatu kelompok etnis yang berada di Sudan Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu konflik ini kemudian menyebar menjadi konflik terbuka hingga memicu terjadinya perang saudara. Hal ini membuat komunitas internasional seperti PBB, IGAD dan beberapa negara memberikan keterlibatannya guna menemukan upaya damai di konflik Sudan Selatan. Penelitian ini akan menganalisis peran PBB, IGAD dan beberapa negara dalam menemukan resolusi konflik dalam konflik Sudan Selatan. Dengan menggunakan kerangka pemikiran konflik, institusionalisme liberal dan pembangunan perdamaian, penelitian memperlihatkan bahwa suatu konflik akan menemukan solusi damai bila kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik terwadahi secara baik. Dalam hal ini peran mediator dari IGAD terutama, memiliki peran kunci di konflik Sudan Selatan.

After the independence referendum, South Sudan was in a state of political destabilization that brought it back into conflict. This conflict began with a sense of dissatisfaction with the political elite of the government by an ethnic group in South Sudan. However, over time this conflict then spread into open conflict until it triggered a civil war. This made the international community such as the United Nations, IGAD and several countries provide their involvement to find peaceful efforts in the South Sudan conflict. This research will analyze the role of the UN, IGAD and several countries in finding conflict resolution in the South Sudan conflict. By using the framework of conflict, liberal institutionalism and peacebuilding, the research shows that a conflict will find a peaceful solution if the interests of the parties involved in the conflict are well accommodated. In this case, the mediator role of IGAD in particular, has a key role in the South Sudan conflict.

This is an open-access article under the CC BY-NC license.



Pendahuluan

Sudan Selatan adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Timur dan mencapai kemerdekaannya pada tahun 2011 melalui referendum. Meski telah mencapai kemerdekaannya, stabilitas politik domestic Sudan Selatan masih berada dalam polarisasi politik yang cukup memprihatinkan. Dua tahun pasca kemerdekaannya, Sudan Selatan mengalami ketegangan politik yang terjadi di antara para pemimpin besarnya antara Presiden Salva Kiir dari etnis Dinka dengan mantan wakil presidennya Riek Machar dari etnis Nuer.

Identitas etnis dan persaingan sumber daya alam menjadi faktor utama ketegangan politik di Sudan Selatan. Konflik diawali dengan tuduhan Presiden Salva Kiir terhadap mantan wakil presidennya, Riek Machar yang menganggap merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Salva Kiir. Dengan tegas, Machar menyangkal tuduhan tersebut, yang kemudian konflik ini berkepanjangan dengan adanya serangan yang menargetkan etnis Nuer. Selama beberapa hari pertama konflik, ratusan warga sipil terbunuh dan serangan balasan dari etnis Nuer terhadap Dinka terus menyebar sebagai bentuk balas dendam. Dengan dukungan dari beberapa komandan militer senior di Nuer, Machar mendeklarasikan pemberontakan terhadap Presiden Kiir. (Afriyie, 2020) Deklarasi Machar memicu ketegangan konflik semakin tinggi, hingga

menyebabkan terjadinya pembunuhan massal, kekerasan dan pengungsian secara besar-besaran pada 15 Desember 2013. Sebuah studi memperkirakan bahwa hamper 400.000 orang tewas selama perang, dengan empat juta orang mengungsi di dalam negeri atau terpaksa meninggalkan negara tersebut. (Action, 2025)

Eskalasi konflik yang pecah di tahun 2013 berhasil diturunkan tensinya pada tahun 2015 dengan penandatanganan Perjanjian tentang Penyelesaian Konflik di Republik Sudan Selatan (ARCSS). Kesepakatan tersebut memberikan kesempatan kepada Machar untuk kembali ke Juba pada April 2016 dan Kembali menjadi wakil presiden di Sudan Selatan. Namun setelahnya, kekerasan kembali terjadi antara pasukan pemerintah dengan faksi oposisi. Machar melarikan diri dari Juba pada 31 Juli 2016 dan lebih dari 200 orang tewas pada hari berikutnya. (Organization, 2019) Pada tahun 2017 dan 2018, serangkaian gencatan senjata dinegosiasikan ulang. Pada Juni 2018, Kiir dan Machar menandatangani Deklarasi Khartoum yang dimediasi oleh Uganda dan Sudan. Kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata dan komitmen untuk merundingkan pengaturan pembagian kekuasaan dalam rangka mengakhiri konflik. Namun, pelanggaran kembali terjadi oleh kedua belah pihak selama beberapa minggu berikutnya. Akan tetapi, upaya damai berhasil dikembalikan dengan penandatanganan Perjanjian Revitalisasi tentang Penyelesaian Konflik di Sudan Selatan (R-ARCSS) pada 12 September 2018.

R-ARCSS menjadi perjanjian terakhir kedua belah pihak yang masih disepakati hingga saat ini. Kehadiran R-ARCSS menandai tonggak penting upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di Sudan Selatan. (Gai, 2025) R-ARCSS juga menjadi cerminan resolusi konflik yang memerlukan waktu cukup panjang untuk pencapaiannya secara optimal. Tidak hanya itu, inisiatif upaya perdamaian R-ARCSS memperlihatkan pentingnya peran komunitas internasional dalam memediasi suatu konflik. Dengan kata lain, pencapaian R-ARCSS tidak akan ada dan berhasil tanpa bantuan mediasi dari komunitas internasional, seperti PBB, IGAD, Uni Afrika, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya. Untuk mengkaji lebih dalam tentang peran dari komunitas internasional tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada telaah kegagalan dan keberhasilan komunitas internasional dalam upaya mencapai perdamaian di konflik Sudan Selatan melalui R-ARCSS.

Kajian Pustaka

Konflik

Reimer et.al. (2015), mengungkapkan konflik secara umum dipahami sebagai bentrokan antara dua pihak. Namun, dalam kenyataannya, 'asal-usul, proses, hasil dan konsekuensi konflik lebih dalam dan lebih tahan lama daripada sekedar benturan sederhana. Asumsi tambahannya adalah bahwa hasil dari sebuah konflik mengharuskan salah satu pihak menang dan menciptakan siklus kekerasan yang membuat konflik menjadi stagnan. Oleh karena itu, konflik dipahami sebagai ketidaksepakatan di mana dua pihak atau lebih dalam situasi tertentu merasa bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka terancam. (Reimer, 2015) Suatu konflik memiliki sumber konflik yang tidak langsung, tetapi dapat menjadi kompleks karena sejarah, budaya dan identitas.

Hukum humaniter internasional membedakan konflik bersenjata ke dalam dua kelompok yakni konflik bersenjata internasional yang melibatkan dua negara atau lebih dan konflik bersenjata non internasional yang terjadi antara pasukan pemerintah dan/atau kelompok bersenjata non bersenjata. (Cross, 2022) Lebih lanjut, konflik berbasis negara dibedakan menjadi empat sub kategori. Pertama, konflik antar negara yang melibatkan konfrontasi antar negara. Kedua, konflik dalam negara yang melibatkan pemerintah suatu negara dengan kelompok-kelompok internal yang berlawanan. Ketiga, intra-negara yang terinternasionalisasi, yang melibatkan pemerintah suatu negara dengan kelompok oposisi internal, tetapi dengan intervensi pasukan internasional. Terakhir, konflik yang melibatkan negara yang diakui oleh sebuah system internasional dan entitas politik yang tidak diakui. Teori konflik membantu penulis dalam menganalisis konflik Sudan Selatan sebagai konflik berbasis negara yang masuk ke dalam kategori kedua.

Institusionalisme Liberal

Institusionalisme liberal menjelaskan bahwa institusi domestik dan internasional memiliki peran sentral dalam memfasilitasi kerja sama dan perdamaian antar negara-bangsa. Paradigma ini muncul sebagai koreksi terhadap hubungan internasional konvensional, yang berargumen bahwa negara-bangsa kuat mendominasi politik dunia dan berbagai Lembaga internasional tidak penting. (Heiss, 2018) Institusionalisme liberal berkembang pesat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan kemunculan lembaga-lembaga internasional pada saat itu.

Paradigma institusionalisme liberal bekerja lebih baik ketika ancaman penggunaan kekuatan rendah atau biaya perang membuat penggunaan kekuatan menjadi tidak menarik. Dengan kata lain, negara-negara akan bekerja sama ketika mereka relative aman dan sensitivitas mereka terhadap keuntungan relative rendah.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa potensi konflik dan krisis dapat diminimalisir ketika para anggota yang sudah berkolaborasi dalam suatu organisasi memiliki kepentingan yang sama dan ketergantungan satu sama lain. Hal ini kemudian akan memengaruhi cara penyelesaian konflik yang lebih mengedepankan diskusi, forum dan dialog. (Idris, 2022) Secara singkat, paradigma institusionalisme liberal mengedepankan perdamaian dan kerja sama dalam pelaksanaan setiap kebijakan, keputusan dan reaksi terhadap isu-isu yang muncul. Teori ini sangat dikenal dalam konteks penanganan konflik. Paradigma institusionalisme liberal akan membantu penulis dalam memahami peran PBB, IGAD dan Uni Afrika dalam memediasi konflik Sudan Selatan.

Konsep Pembangunan Perdamaian

Pembangunan perdamaian dipahami sebagai konsep komprehensif yang mencakup, menghasilkan dan mempertahankan rangkaian lengkap proses, pendekatan, dan tahapan yang diperlukan untuk mengubah konflik menjadi hubungan yang lebih berkelanjutan dan damai. (Lederach, 1998) Dengan kata lain, pembangunan perdamaian menjadi salah satu kunci mencapai resolusi konflik yang efektif dalam jangka panjang.

Pembangunan perdamaian tersebut, memerlukan peran partisipasi aktif dari semua segmen masyarakat yang terdampak akibat konflik. Dalam tulisannya, Lederach (1998) menggambarkan masyarakat yang terdampak konflik sebagai sebuah piramida. Puncak piramida ditempati oleh para pemimpin militer dan politik, lalu pada bagian tengah para pemimpin yang berada di sector-sector seperti kesehatan, pendidikan, dan mereka yang berada di posisi tinggi dalam hirarki militer. Sementara itu, di tingkat akarnya, adalah Sebagian besar kelompok yang terdampak seperti masyarakat umum, pengungsi, kelompok gereja, pemimpin local dan lain-lain. (Lederach, 1998, p. 51) Oleh karenanya, koordinasi strategi pembangunan perdamaian di ketiga tingkat perlu dilakukan untuk mencapai resolusi konflik yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan catatan, berbagai actor yang ada dalam tingkatan tersebut harus disesuaikan dengan metodologi pembangunan perdamaian yang berbeda. (Lederach, 1998, pp. 44-54)

Secara rinci, cara kerja piramida pembangunan perdamaian disesuaikan dengan system tiga tingkat. Pertama, dalam pembangunan perdamaian penting untuk melibatkan perantara atau mediator yang didukung oleh pemerintah asing atau organisasi internasional. Tujuan keterlibatan perantara atau mediator ini adalah untuk membantu proses penyelesaian melalui negosiasi yang dijalankan oleh mereka. Kedua, peran actor-aktor di tingkat menengah perlu ditekankan mengingat mereka memiliki potensi paling besar dalam membangun pondasi perdamaian. Peran actor-aktor di tingkat menengah ini dihargai lebih tinggi daripada sumber daya penciptaan perdamaian di dalam komunitas. Ketiga, pelatihan resolusi konflik dan pengembangan komisi perdamaian harus dilakukan melalui pendekatan bottom-up agar perdamaian berjalan sesuai dengan konteksnya dan tidak dipaksakan dari luar. Konsep pembangunan perdamaian ini digunakan penulis untuk menganalisis R-ARCSS sebagai hasil dari resolusi konflik yang dicapai melalui pembangunan perdamaian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah social. Proses penelitian kualitatif melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, dengan analisis data secara induktif yang dibangun dari hal-hal khusus ke tema-tema umum dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. (Creswell, 2014). Sejalan dengan Creswell, Lamont (2015) menjelaskan bahwa analisis data dalam metode kualitatif dilakukan dalam bentuk kata-kata, yang bergantung pada penalaran secara induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu konflik yang disebabkan oleh kepentingan elit politik dapat menyebar luas menjadi konflik yang semakin kompleks akar penyebabnya. Dalam studi kasus konflik Sudan Selatan, konflik yang dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan elit politik antara Presiden Salva Kiir dengan wakil presidennya Riek Machar, meluas menjadi konflik etnis karena identitas etnis yang dimiliki oleh kedua elit politik tersebut diikutkan dalam setiap tuduhan yang mereka lakukan. Konflik semakin meluas ketika persoalan etnis yang dibawa oleh Kiir dan Machar memengaruhi pendapat dan sikap

dari etnis lainnya yang ada di Sudan Selatan. Kompleksitas konflik tersebut berujung pada konflik terbuka hingga terjadi genosida yang menimbulkan banyak korban.

Dalam temuan selanjutnya, kondisi konflik yang menimbulkan genosida memunculkan respon dari komunitas internasional untuk terlibat dalam upaya mendamaikan konflik. IGAD yang didukung oleh PBB dan negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia berupaya untuk memediasi konflik di Sudan Selatan. Hasilnya, meski sempat gagal upaya damai yang dilakukan oleh IGAD di tahun 2015 melalui perjanjian ARCSS, namun kegagalan tersebut memberikan pengalaman yang menjadi kunci keberhasilan pada perjanjian berikutnya di tahun 2018 yaitu R-ARCSS. Kesuksesan IGAD dalam mewujudkan kedamaian melalui resolusi konflik R-ARCSS memperlihatkan bahwa peran mediator yang netral dalam suatu konflik sangat penting untuk menghasilkan upaya damai yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Konflik Sudan Selatan

Sudan Selatan adalah negara yang memiliki deposit alam yang signifikan karena kepemilikan komersial atas sumber daya minyak dan gas alam, emas, berlian, besi, bijih besi, tembaga dan mineral lainnya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Sudan Selatan menjadi negara dengan status negara kata dalam hal kekayaan mineral. Akan tetapi, di tengah kekayaan sumber daya alamnya, lebih dari setengah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan negara ini hidup dalam kondisi perang saudara yang berkepanjangan. Tidak hanya itu, meski sudah merdeka, Sudan Selatan masih memiliki kelemahan dalam hal tata Kelola infrastruktur, kekerasan politik, pertanyaan tentang legitimasi rezim hingga kerawanan pangan dan konflik perbatasan. Dengan kondisi yang demikian, Sudan Selatan termasuk ke dalam kategori negara rapuh. Paul Collier mendeskripsikan Sudan Selatan sebagai negara yang hidup di abad ke-14. (Collier, 2007)

Konflik Sudan Selatan bukanlah fenomena yang baru terjadi. Bila kembali ke masa lalu, awal gerakan nasional Sudan sudah ada sejak tahun 1920-an. Hal itu ditandai dengan pembentukan Brigade Putih anti Inggris yang dibentuk oleh dua orang Sudan Selatan, yaitu Ali Abdalatif yang merupakan seorang etnis Dinka dan Abdalfadheel El Maz, seorang etnis Nuer. (Yusuf Kiranda, 2016) Sebelum terjadi kebrutalan pada 15 Desember 2013, pada tahun 2008 sudah terdapat sinyal adanya ketegangan politik yang luas yang ditandai dengan adanya perselisihan di dalam partai yang berujung pada kekerasan. Pada saat itu, ketidaksepakatan antara Presiden dan Sekretaris Jenderal Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), Pagan Amm, mengancam akan merusak proses pemilu. (Koos, 2014) Ketegangan dalam kelas politik memuncak ketika wakil presiden Riek Machar, Sekjen SPLM Pagan Amm, dan Rebecca Garang mencalonkan diri sebagai ketua SPLM agar bisa menjadi presiden Sudan Selatan. Sikap elit politik tersebut direspon oleh Presiden Kiir dengan memakzulkan kekuasaan eksekutif Riek Machar, membubarkan pemerintahan, mengusir Riek dan lainnya dari semua jabatan pemerintahan pada Juli 2013. (Group, 2014) Bahkan, Presiden Kiir juga menuduh 75 menteri dan pejabat pada tahun 2012 mencuri dana negara sebesar \$4 milyar dan menuntut pengembalian dana.

Ketegangan politik yang memuncak lantas menjadi awal pemicu terjadinya perang sipil di Sudan Selatan pada 15 Desember 2013. Presiden Kiir dan Machar telah secara efektif memobilisasi kelompok-kelompok kunci dari komunitas mereka secara terpisah, untuk memperlihatkan etnisitas sebagai penyebab konflik di antara mereka. Pada awal Februari 2014, diperkirakan hamper 750.000 orang mengungsi akibat pertempuran yang terjadi di Juba and tiga negara bagian, 85.200 orang mencari perlindungan di kompleks Misi PBB di Republik Sudan Selatan (UNMISS), dan lebih dari 130.000 orang melarikan diri ke negara tetangga serta jumlah korban tewas bervariasi mulai dari 1.000 hingga 100.000 korban jiwa. (Yusuf Kiranda, 2016, p. 33)

Pembangunan Perdamaian

Melihat konflik Sudan Selatan yang semakin brutal sejak akhir 2013, IGAD sebagai salah satu organisasi regional di Afrika melakukan upaya damai dengan dukungan dari Norwegia, Inggris dan Amerika Serikat, dan Uni Afrika pada tahun 2014. Upaya yang dilakukan dengan menetapkan target ambisius untuk mencapai kesepakatan damai dalam konflik Sudan Selatan pada tanggal 5 Maret 2015. Di sisi lain, pada bulan yang sama, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi kepada sejumlah individu atas peran mereka dalam konflik yang terjadi, termasuk Presiden Kiir dan Riek Machar. Dewan Keamanan PBB juga memberikan tekanan untuk para pelaku regional dan internasional untuk menandatangani perjanjian damai yang dilakukan paling lambat pada 17 Agustus 2015. (Policy, 2014) Perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Damai Republik Sudan Selatan (ARCSS) berisikan mengenai pembagian kekuasaan, yang telah dimediasi oleh IGAD sebelumnya.

Perjanjian tersebut juga memfasilitasi kepulangan Machar ke Juba pada April 2016 dan pembentukan Pemerintah Transisi Persatuan Nasional (TGoNU).

Akan tetapi, pada Juli 2016, pertempuran kembali terjadi antara pasukan dari Presiden Kiir dan Machar di Juba. Machar melarikan diri untuk kedua kalinya, yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan transisi secara *de facto*, meningkatnya kekerasan menjadi genosida dan memburuknya ancaman terhadap keamanan regional. Pelarian Machar ini kemudian membuat pasukan militer yang setia pada Presiden Kiir yakni Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) melakukan operasi terkoordinasi untuk melakukan pembunuhan dan kampanye pengeboman di negara bagian Ekuatoria Barat. Tindakan yang dilakukan oleh Kiir dan Machar menunjukkan adanya pelanggaran gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya dan menyebabkan TGoNU menjadi lumpuh. (Knopf, 2016) Dengan kata lain, ARCSS sebagai upaya damai tidak dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya.

Melihat hal tersebut, berbagai inisiatif upaya damai kembali menjadi perhatian baik di level nasional maupun regional. IGAD yang merupakan blok regional beranggotakan tujuh negara (Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan Selatan, Sudan dan Uganda) mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Kepala Negara dan Pemerintahan untuk membahas secara khusus persoalan Sudan Selatan pada tanggal 12 Juni 2017. Dalam KTT yang berlangsung, IGAD membentuk *High Level Revitalization Forum* (HLRF) dan mempertemukan para pihak yang bertikai untuk berunding dan menyepakati kembali ARCSS sebagai perjanjian damai. Setelah peluncurannya secara resmi pada Desember 2017, HLRF memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi negosiasi damai dalam konflik Sudan Selatan. Selama 15 bulan, HLRF telah mampu memfasilitasi negosiasi damai antara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan dan Tentara Dalam Pemerintahan (SPLM/A-IG) yang dipimpin oleh Presiden Salva Kiir, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan dan Tentara dalam Oposisi (SPLM-A-IO) yang dipimpin oleh Riek Machar, serta partai-partai oposisi lainnya. Mediasi yang dilakukan oleh HLRF ini menghasilkan *Revitalized-ARCSS* (R-ARCSS) sebagai hasil akhirnya.

R-ARCSS menjadi tonggak penting dalam upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di Sudan Selatan. Kesepakatan ini bertujuan untuk menjadi peta jalan guna mengendalikan '*party war*' yang pecah pada tahun 2013 dan 2016, yang mana sebagian besar berakar pada reformasi politik dalam partai yang berkuasa. (Aalen, 2021) Lebih lanjut, kesepakatan R-ARCSS ditandatangani antara pihak pemerintah (TGoNU), oposisi utama (SPLM/A-IO), Aliansi Oposisi Sudan Selatan (SSOA), mantan tahanan (FD), dan Partai Oposisi Lainnya (OPP). R-ARCSS menjabarkan pembagian kekuasaan di badan legislatif nasional dengan perbandingan 60:23:9:6:2 (332, 128, 50, 30 dan 10 anggota, dengan total 550 anggota), dan dewan menteri, posisi dibagi 20 untuk TGoNU, 9 untuk SPLM/A-IO, 2 untuk FD dan 1 untuk OPP. (Studies, 2019)

Evaluasi Proses Mediasi Internasional

R-ARCSS menandai keberhasilan IGAD dan para aktor internasional lainnya dalam menyediakan kerangka kerja yang mampu mengatasi akar penyebab konflik Sudan Selatan. Dengan proses yang panjang, R-ARCSS telah mampu mengidentifikasi penyebab pertikaian internal partai seraya mempromosikan rekonsiliasi, tata kelola dan pembangunan aspek sosial-ekonomi selama berada dalam masa kekacauan.

Konflik Sudan Selatan yang pecah pada tahun 2013 dan 2016, menegaskan bahwa konflik internal yang merusak partai berkuasa, menyebabkan kekerasan berbasis etnis di antara faksi-faksi SPLM. Dengan identifikasi akar penyebab konflik tersebut, IGAD bersama para aktor lainnya yang terlibat dalam upaya pembangunan perdamaian di konflik Sudan Selatan mendorong dan mewujudkan R-ARCSS sebagai perjanjian damai. R-ARCSS sebagai perjanjian damai diimplementasikan dengan '*power sharing*' yang dianggap adil dan mampu mewartakan setiap kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat konflik Sudan Selatan. *Power sharing* R-ARCSS dijabarkan dengan pembagian kekuasaan di badan legislatif nasional dan dewan Menteri. Selanjutnya, mengatur tentang penyatuan, pelatihan dan penempatan kembali pasukan yang akan dilakukan dalam delapan bulan pertama (pra transisi), yang mana masa jabatan pemerintahan transisi akan dimulai selama 36 bulan, memberikan peninjauan konstitusional serta pengaturan tentang pemilihan umum untuk pemerintah berikutnya. Terakhir, mengatur pembagian daerah pemilihan menurut batas-batas suku tahun 1956.

Di sisi lain, kehadiran R-ARCSS memperlihatkan kegagalan mediator seperti IGAD dan para aktor lainnya dalam menyediakan kerangka mediasi yang efektif di tahun 2016 sebelum R-ARCSS dibentuk. ARCSS sebagai kesepakatan damai pertama sebelum adanya R-ARCSS, menunjukkan IGAD sebagai aktor regional memiliki kredibilitas yang dipertanyakan sebagai mediator. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa IGAD sebagai mediator lebih memihak pihak tertentu. (Lindsay, 2019) Namun, *International Crisis Group* (ICG) memberikan sudut pandang berbeda terkait kegagalan mediasi IGAD dalam mendorong upaya damai konflik Sudan Selatan melalui ARCSS. Menurut ICC, ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan IGAD dalam upaya damai yang pertama yakni 1) persaingan regional dan perebutan kekuasaan; 2) sentralisasi pengambilan keputusan di tingkat HoS level; dan 3) kesulitan dalam memperluas proses perdamaian di luar elit politik Sudan Selatan. Ketiga faktor ini menghasilkan perdamaian yang rapuh, tidak lengkap dan beresiko tinggi untuk runtuh

karena kurangnya kemauan politik dari komunitas internasional untuk bertindak secara kolektif dalam mengatasi tantangan yang muncul pasca ARCSS disetujui. (Gai, 2025) Meskipun begitu, IGAD masih terus mengadvokasi upaya damai pasca ARCSS gagal diimplementasikan. Pengalamana kegagalan pada upaya damai ARCSS, menjadi dorongan kuat IGAD untuk merevitalisasi perjanjian damai yang sesuai dengan kepentingan para pihak yang terlibat konflik. R-ARCSS menjadi model kerangka kerja damai untuk membentuk Sudan Selatan sebagai negara konsosiasional.

Penutup

Konflik Sudan Selatan merupakan salah satu konflik yang berakar pada benturan kepentingan elit politik yang berkuasa. Benturan konflik ini kemudian mengerucut pada persoalan etnis yang menjadi latar belakang identitas elit politik yang berkuasa. Konflik lalu berlanjut pada perebutan kekuasaan politik dan sumber daya, yang tidak hanya diperebutkan oleh etnis Dinka dan Nuer tapi juga etnis lainnya. Dengan latar belakang ini, konflik berkembang dan pecah menjadi perang saudara yang berkepanjangan hingga memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, utamanya social, ekonomi dan politik Sudan Selatan.

Signifikansi dampak yang timbul dari konflik Sudan Selatan, memicu komunitas internasional untuk terlibat dalam penanganan konflik tersebut. PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan damai memiliki kemampuan terbatas dalam penanganan konflik ini. Peran PBB hanya sebatas memberikan perlindungan warga sipil tanpa bisa menyerang milisi atau memaksa pihak-pihak yang terlibat konflik untuk berdamai. IGAD sebagai organisasi regional memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan proses perdamaian konflik Sudan Selatan. Meski sempat gagal dengan kesepakatan ARCSS yang dibentuk pada tahun 2015, namun dorongan kuat untuk mengadvokasi upaya damai berhasil dilakukan pada 2018 melalui R-ARCSS.

R-ARCSS menjadi tonggak penting perdamaian konflik Sudan Selatan yang masih berlangsung hingga saat ini. Pengalaman kegagalan dalam isian kesepakatan ARCSS, menjadi cerminan untuk menciptakan upaya damai yang lebih komprehensif dituangkan dalam R-ARCSS. Konsep *'power sharing'* mampu menciptakan stabilitas damai Sudan Selatan dan mampu mewadahi berbagai kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Terlepas dari banyak tantangan dalam pengimplementasiannya, namun R-ARCSS masih efektif untuk menjadi pedoman dan rujukan penciptaan damai di Sudan Selatan hingga saat ini. R-ARCSS juga memperlihatkan pentingnya peran mediator dalam mengatasi suatu konflik dengan sikap yang netral.

Referensi

- Aalen, L. (2021). South Sudan: Steps Towards Peace Given in New Agreement. *Journal of Peace Research*, 58(4), 520-530.
- Action, C. f. (2025, March 21). *Center for Prevention Action Organization*. Retrieved from Center for Prevention Action Web site: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan>
- Afriyie, F. A. (2020). Comprehensive analysis of South Sudan conflict: determinants and. *Journal of Liberty and International Affairs*, 6(1), 33-47.
- Collier, P. (2007). *The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. New York: SAGE Publication.
- Cross, I. C. (2022). *International Committee of the Red Cross*. International Committee of the Red Cross. Retrieved from International Committee of the Red Cross Web site.
- Gai, P. G. (2025). Revitalized Agreement on The Resolution of Conflict in South Sudan: Reflecting Success, Failure and Potential Consequences. *IOSR-Journal Of Humanities And Social Science*, 2(3)17-29.
- Group, I. C. (2014). *South Sudan: A Civil War by Any Other Name*. Brussel: International Crisis Group.
- Heiss, T. J. (2018). Liberal Institutionalism. In T. G. Wilkinson, *International Organization and Global Governance* (pp. 123-134). London: Routledge.
- Idris, M. F. (2022). Liberal Institutionalism Theory Approach in ASEAN's Security Cooperation through Regionalism. *Akademika*, 92(1) 73-86.
- Knopf, K. A. (2016). *Emdig South Sudan's Civil War*. New York: Council on Foreign Relations: Center for Preventive Action.
- Koos, C. a. (2014). South Sudan"s newest war: When two old men divide a nation. *South Sudan"s newest war: When two old men divide a nation*. GIGA Focus International Edition English.

- Lederach, J. P. (1998). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC.: United States Institute of Peace Press.
- Lindsay, J. (2019). Mediation, Credibility, And Conflict Resolution in South Sudan. *International Journal of Conflict Management*, 30(2) 145-162.
- Organization, A. C. (2019). *Africa Center for Strategic Studies*. Retrieved from Africa Center Organization Web site: <https://africacenter.org/wp-content/uploads/2019/12/Timeline-of-South-Sudan-Peace-Agreements-and-Violence-printable.pdf>
- Policy, F. (2014, February 24). *Foreign Policy*. Retrieved from Foreign Policy Web site: <https://foreignpolicy.com/2015/02/24/u-s-threatens-south-sudan-with-sanctions-again>
- Reimer, L. S. (2015). *Transformative Change: An Introduction to Peace and Conflict Studies*. Lexington Books.
- Studies, H. I. (2019, February 1). *HORN Institute Organization*. Retrieved from HORN Institute Organization Web site: <https://horninstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/No.-17.-The-Revitalized-Agreement-for-Resolution-of-Conflict-in-South-Sudan-R-ARCSS-1.pdf>
- Yusuf Kiranda, M. K. (2016). Conflict and State Formation in South Sudan: The Logic of Oil Revenues in Influencing the Dynamics of Elite Bargains. *Journal On Perspective of African Democracy & Development*, 1(1) 30-40.